

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan memengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual umumnya dipilih karena dianggap mampu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih riil. Manajemen sering kali memilih kebijakan tertentu untuk menghasilkan pelaporan laba yang baik. Beberapa laporan keuangan, laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang sering dilihat oleh pihak berisiko dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk dapat membantu menilai risiko investasi dan kredit. Informasi laba yang penting merupakan tanggung jawab pihak manajemen kepada para pihak berkepentingan. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi laba dalam memastikan keputusan yang akan diambil untuk kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Keadaan ini memungkinkan manajer untuk melakukan tindakan menyimpang dalam melaporkan dan menyajikan informasi laba, yang disebut praktik manajemen laba.

Laba merupakan suatu asersi manajemen yang kualitasnya perlu dibuktikan. Kualitas laba merupakan salah satu fokus utama yang sering diperhatikan oleh investor, kreditor, maupun pemerintah. Dalam laporan keuangan, laba merupakan salah satu informasi yang penting. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pedoman pengenaan pajak, kebijakan dividen, dan pedoman untuk proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, di dalam melakukan analisis laporan keuangan, baik oleh pihak eksternal maupun internal, laba juga sering digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kompensasi atau bonus kepada manajemen (Jannah, 2024).

Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik agar tetap dipercaya oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti investor, kreditor, maupun pemerintah. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan adalah laba yang

dilaporkan dalam laporan keuangan. Laba sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti pembagian dividen, kebijakan investasi, maupun penilaian kinerja manajemen. Namun, tekanan untuk menampilkan laba yang tinggi sering kali mendorong manajemen melakukan manajemen laba (*earnings management*), yaitu upaya mengatur laba sesuai kepentingan tertentu tanpa harus melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (Faradilla & Agustin, 2021).

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola laba dengan tujuan mengubah laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan dengan memilih model akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yang pada akhirnya bertujuan guna mendapatkan suatu laba bagi (Fathoni & Indrianto, 2021). Prosedur manajemen laba dilakukan dengan mengurangi variabilitas keuntungan dan meningkatkan atau mengurangi keuntungan tersebut, tergantung pada motivasi manajer untuk memodifikasi keuntungan tersebut. Isi dari laporan keuangan digunakan sebagai pilar penting untuk pengambilan keputusan bagi para pihak yang terlibat dalam perusahaan. Laporan laba rugi adalah bagian penting dari laporan keuangan karena menunjukkan bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan berjalan.

Manajemen Laba merupakan fenomena kompleks dalam pelaporan keuangan yang didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada dasarnya, praktik ini adalah upaya sistematis manajemen untuk membentuk persepsi para pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan melalui rekayasa angka laba, meskipun secara teknis masih berada dalam batas-batas Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Fenomena ini didasari oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan tersebut, terdapat konflik kepentingan yang diperparah oleh asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih superior. Kondisi ini menciptakan dorongan bagi *agent* untuk memanipulasi laporan keuangan demi memaksimalkan utilitas dan keuntungan pribadi, seperti mendapatkan bonus, meningkatkan reputasi, atau mengamankan posisi jabatan.

Secara metodologis, manajemen laba dapat diwujudkan melalui dua pendekatan strategis yang berbeda. Pertama adalah manajemen laba akrual (*accrual-based earnings management*) yang dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas yang melekat dalam standar akuntansi berbasis akrual. Dalam pendekatan ini, manajemen menggunakan pertimbangan (*judgment*) dan estimasi dalam kebijakan akuntansinya, seperti mengubah estimasi masa manfaat aset tetap, metode penyusutan, penilaian persediaan, atau pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Tindakan ini bertujuan untuk menggeser pengakuan pendapatan dan beban antar periode pelaporan, sehingga laba dapat "dibentuk" sesuai keinginan tanpa mengubah arus kas riil (Dechow et al., 1995). Kedua, dan semakin banyak ditemui dalam penelitian terkini, adalah manajemen laba riil (*real earnings management*). Berbeda dengan pendekatan akrual, manajemen laba riil melibatkan rekayasa terhadap transaksi operasional yang substantif dan nyata. Tindakan ini dapat berupa pemotongan diskresioner atas pengeluaran seperti penelitian dan pengembangan (R&D), pemasaran, dan pemeliharaan; penjualan aset produktif; atau pemberian diskon penjualan yang agresif di akhir periode untuk mendongkrak *revenue*. Meskipun dapat mencapai target laba jangka pendek, tindakan ini sering kali merusak nilai perusahaan dan daya saingnya dalam jangka panjang (Roychowdhury, 2006).

Praktik manajemen laba dapat diwujudkan melalui dua pendekatan strategis yang berbeda. *Pertama* adalah manajemen laba akrual (*accrual-based earnings management*) yang dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas yang melekat dalam standar akuntansi berbasis akrual. Dalam pendekatan ini, manajemen menggunakan pertimbangan (*judgment*) dan estimasi dalam kebijakan akuntansinya, seperti mengubah estimasi masa manfaat aset tetap, metode penyusutan, atau pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Tindakan ini bertujuan untuk menggeser pengakuan pendapatan dan beban antar periode pelaporan, sehingga laba dapat "dibentuk" sesuai keinginan tanpa mengubah arus kas riil. Kedua, dan semakin banyak ditemui dalam penelitian terkini, adalah manajemen laba riil (*real earnings management*) yang melibatkan rekayasa

terhadap transaksi operasional yang substantif, seperti pemotongan biaya penelitian dan pengembangan atau pemberian diskon besar-besaran di akhir periode.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa praktik manajemen laba didasarkan pada konflik antara *agent* dan *principal*. *Principal* (pemilik saham) menginginkan kinerja yang baik untuk memaksimalkan keuntungan, sementara *agent* (manajemen) bertindak untuk mencapai keuntungan yang tinggi sebagai syarat evaluasi kinerja dan perolehan bonus (Kanji, 2019). Konflik ini diperburuk oleh adanya asimetri informasi, yang memungkinkan manajer mengeksploitasi celah regulasi, salah satu motif utamanya adalah saat perusahaan memerlukan modal besar, misalnya dengan menerbitkan saham. Manajemen terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan cara membengkakkan nilai keuntungan perusahaan untuk menarik investor, tindakan ini merupakan cerminan penerapan metode manajemen laba yang harus diwaspadai.

Permasalahan yang telah muncul selama beberapa dekade terakhir seiring dengan meningkatnya prevalensi kasus pelanggaran perusahaan di seluruh dunia terkait manajemen laba adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen laba tampaknya telah menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*). Hal ini jelas sangat berbahaya bagi semua pihak yang terkait, termasuk mereka yang bekerja langsung untuk perusahaan. Kedua, pemilik, komisaris, regulator (baik badan profesional maupun pemerintah), akuntan publik, dan auditor internal semuanya dapat terlibat dalam penyimpangan bisnis, tidak hanya manajer. Ketiga, situasi penyimpangan tidak hanya terjadi di negara berkembang yang sistemnya belum terimplementasi secara tepat, tetapi juga di negara maju yang sistemnya telah terstruktur dengan baik. Kasus-kasus manajemen laba tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, seperti Indonesia.

Manajemen laba yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena penting dalam praktik bisnis perusahaan. Praktik ini dapat terjadi di berbagai sektor manufaktur, baik pada perusahaan skala besar maupun kecil. Di Indonesia, kasus manajemen laba pada PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) sebuah perusahaan sosis menjadi sorotan pada tahun 2020 akibat tekanan yang sangat besar dari pandemi. Perusahaan mengalami penurunan total pendapatan antara 25% hingga 50% pada periode yang berakhir 30 Juni 2020 dibandingkan periode sebelumnya,

dengan laba bersih yang anjlok lebih dari 75%. Krisis ini memaksa organisasi mengambil langkah drastis, termasuk pemecatan lima karyawan (sehingga jumlah tenaga kerja menyusut menjadi 224 orang) serta pemotongan kompensasi hingga 50%. Di tengah tantangan operasional ini, FOOD juga mencatatkan utang sementara yang tumbuh sebesar Rp10 miliar. Para eksekutif bahkan memperkirakan bahwa dampak pandemi akan mempersulit organisasi untuk memenuhi komitmen finansialnya.

Meskipun menghadapi penurunan kinerja operasional, laporan keuangan PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) periode Januari hingga September 2020 menunjukkan sejumlah data yang patut dicermati dari sudut pandang manajemen laba. Laba bersih periode tersebut tercatat sebesar Rp 69.410.000.000, mengalami penurunan 23,85%, dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 91.160.000.000. Penurunan ini konsisten dengan beban pokok penjualan sebesar 25,98%, serta laba kotor yang turun 19,84%, menjadi Rp 25.290.000.000. Namun demikian, perusahaan justru meningkatkan biaya promosi menjadi Rp 20.910.000.000 dari sebelumnya Rp 17.330.000.000. Di sisi lain, biaya umum dan manajerial justru dipangkas 17,84% menjadi Rp 9.990.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan yang cukup substansial pada tingkat entitas induk, yang ditandai dengan pergeseran dari laba bersih pada periode sebelumnya menjadi defisit pada akhir periode berjalan. Kombinasi kenaikan biaya promosi di tengah pemangkasan biaya lain dan penurunan laba yang drastis ini mengindikasikan adanya praktik manajemen laba sebagai respons terhadap tekanan krisis.

Fluktuasi biaya dan laba di tengah tekanan operasional seperti yang dialami oleh PT Sentra Food Indonesia Tbk (FOOD) mengindikasikan adanya potensi praktik manajemen laba. Kasus ini secara implisit membuka pertanyaan mengenai sejauh mana manajemen memanfaatkan celah dalam akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pos-pos akrual, untuk mencapai target laba tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, salah satu area yang memiliki peran sentral dan dapat dimanfaatkan adalah kerangka peraturan perpajakan. Di satu sisi, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal untuk meminimalkan utang pajak. Di sisi lain, adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal

berpotensi menjadi instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba melalui pencatatan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*).

PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) memperlihatkan pola fluktuasi laba yang mengindikasikan potensi praktik manajemen laba sepanjang periode 2021-2024. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, laba bersih yang tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp69,8 miliar mengalami peningkatan sebesar 15,3% menjadi Rp80,5 miliar pada tahun 2022. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 11,7% sehingga laba mencapai Rp89,9 miliar. Akan tetapi, konsistensi pertumbuhan selama tiga tahun berturut-turut tersebut tidak berlanjut pada tahun 2024, di mana perusahaan justru mengalami kontraksi laba bersih yang signifikan hingga 12,4% menjadi Rp78,7 miliar. Pola pertumbuhan yang diikuti penurunan tajam ini merefleksikan adanya tekanan institusional bagi manajemen untuk mempertahankan stabilitas laba pasca-pandemi guna memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Ketidakmampuan manajemen mempertahankan tren pertumbuhan ketika kondisi bisnis riil mengalami perlambatan mengindikasikan adanya celah untuk melakukan rekayasa laba. Besaran fluktuasi yang mencapai 27,1% dalam kurun waktu dua tahun terakhir (dari titik tertinggi Rp89,9 miliar pada tahun 2023 menuju titik terendah Rp78,7 miliar pada tahun 2024) merupakan sinyal empiris yang kuat terhadap kemungkinan praktik manajemen laba, mengingat tidak terdapat perubahan fundamental pada struktur bisnis dan operasional perusahaan sub-sektor es krim tersebut.

Fenomena fluktuasi laba pada CAMP mengindikasikan dua bentuk potensi manajemen laba secara simultan. Pertama, pada rentang waktu 2021-2023 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,5% per tahun, manajemen diduga melakukan praktik perataan laba (*income smoothing*) melalui pemanfaatan diskresi akuntansi agar pola laba terlihat stabil dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kedua, penurunan drastis sebesar 12,4% pada tahun 2024 patut diduga sebagai strategi *big bath accounting*, yaitu kebijakan manajemen untuk mengakui beban-beban secara sekaligus dalam jumlah material agar periode mendatang dapat menunjukkan pemulihan kinerja yang lebih impresif. Apabila dikomparasikan dengan rata-rata pertumbuhan industri makanan dan minuman yang hanya berkisar antara 7% hingga 8% per tahun, kinerja CAMP yang melonjak hingga 15,3%

kemudian terkontraksi 12,4% menunjukkan adanya penyimpangan dari normalitas industri. Deviasi sebesar 7% hingga 8% di atas rata-rata industri ini memperkuat indikasi bahwa praktik manajemen laba kemungkinan besar terjadi, baik melalui manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dengan merekayasa pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual, maupun manajemen laba riil (*real earnings management*) melalui manipulasi keputusan operasional seperti percepatan realisasi penjualan atau penundaan alokasi biaya pemasaran.

Dalam pelaporan keuangan, laba memiliki peran ganda yang strategis, laba berfungsi sebagai ukuran kinerja manajemen yang menentukan besarnya kompensasi atau bonus, sekaligus menjadi dasar penentuan pengenaan pajak oleh pemerintah. Situasi ini menciptakan insentif kuat bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*) yaitu upaya intervensi yang disengaja dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk manajemen itu sendiri. Salah satu area yang memiliki peran sentral dan dapat dimanfaatkan adalah kerangka peraturan perpajakan, di mana perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal untuk meminimalkan utang pajak dengan merekayasa transaksi sesuai peraturan. Selain itu, adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal berpotensi menjadi instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba melalui pencatatan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) (Kanji, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang sangat diandalkan untuk menopang belanja negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak dikumpulkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dari wajib pajak yang merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di sisi lain, perusahaan sebagai entitas ekonomi memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, yang mendorong manajemen untuk melakukan berbagai upaya, termasuk Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), demi menjaga efisiensi keuangan. Kontradiksi antara kewajiban membayar pajak yang tinggi dan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak inilah yang membuka peluang bagi manajemen untuk mengintervensi laporan keuangan dan memicu praktik Manajemen Laba yang terkait dengan aspek perpajakan (Yuliana et al., 2023).

Manajemen laba merujuk pada tindakan akuntansi atau metode tertentu yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mengubah nilai laba yang dilaporkan pada laporan keuangan. Manajer melakukan hal ini karena berbagai alasan, di mana salah satu yang paling penting adalah motivasi penghematan pajak. Menurut Sulistiawan & Januarsi, (2011), konsep motivasi dalam perpajakan berarti mendorong perusahaan atau individu untuk menerapkan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan sering kali melaporkan dan berusaha mencantumkan laba fiskal yang lebih besar daripada nilai sebenarnya dari bisnis tersebut. Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk merumuskan strategi inovatif dalam menerapkan tindakan manajemen laba, sehingga laba pajak yang dilaporkan dapat terlihat lebih rendah, namun tetap selaras dengan norma dan kebijakan yang mengatur akuntansi perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban dalam membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) timbul sebagai akibat konsekuensi dari adanya perbedaan antara pengakuan laba secara akuntansi dan secara fiskal menunjukkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan maupun beban antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Menurut Astutik & Mildawati (2016), beban ini mencerminkan jumlah pajak penghasilan yang akan terutang atau terpulihkan di tahun mendatang, termasuk sisa kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh variasi dalam waktu dan metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara khusus, kewajiban pajak tangguhan timbul dari koreksi fiskal negatif, di mana pendapatan akuntansi lebih besar dari pendapatan kena pajak, atau biaya akuntansi lebih rendah dari biaya kena pajak. Kecenderungan ini menunjukkan adanya upaya manajerial untuk memprioritaskan peningkatan laba sebelum pajak sebab investor sering menilai kinerja perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak sambil meminimalkan biaya akuntansi dibandingkan pengeluaran fiskal.

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Expense*) dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai instrumen dalam praktik Manajemen Laba. Strategi ini

memungkinkan manajer untuk mencapai tujuan utama perusahaan, seperti menghindari kerugian atau mencegah penurunan laba, dengan cara menunda pengakuan penghasilan dan mempercepat pengakuan beban. Tindakan ini bertujuan untuk menghemat pajak dan, sebagai hasilnya, membuat laba yang dilaporkan terlihat lebih kecil (Lubis & Suryani, 2018). Namun (Agustia & Suryani, 2018) mengingatkan bahwa menggeneralisasi seluruh beban pajak tangguhan sebagai komponen diskresioner (kebijakan manajer) dapat menyebabkan bias. Hal ini karena sebagian dari timbulnya beban tersebut merupakan hasil yang tidak dapat dihindari akibat adanya ketidaksesuaian yang melekat antara aturan pajak dan prinsip akuntansi yang berlaku.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah sebuah fungsi esensial dari manajemen pajak dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk praktik manajemen laba. Inti dari perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Upaya ini harus dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperkirakan secara cermat besarnya pajak yang seharusnya dibayar, sekaligus merencanakan strategi yang efektif untuk memperkecil kewajiban pajak tersebut.

Banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan (*inconsistency*) yang signifikan. Mengenai pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, beberapa peneliti menemukan adanya pengaruh yang signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh Jannah, Miftahul (2024), Devitasari, Lucy (2022), dan Firmansyah, Fikrian Rezh dan Mulyani, Sri (2023). Sebaliknya, penelitian lain justru menyimpulkan bahwa Beban Pajak Tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba, sebagaimana ditemukan oleh Lorita Bete *et al.* (2021), Gulo, Meria Meriana (2020), dan Kanji, Lusiana (2019).

Demikian pula, hasil penelitian mengenai pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Manajemen Laba juga terbagi. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Jannah, Miftahul (2024), Devitasari, Lucy (2022), dan Azhara, Vanesa (2023), menemukan adanya pengaruh positif. Namun, temuan ini kontras

dengan penelitian lain yang menyimpulkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, termasuk studi oleh Gulo, Meria Meriana (2022), Yuliana, Novi Antari *et al.* (2023), dan Kanji, Lusiana (2019).

Tabel 1. 1 Research Gap

NO	VARIABEL PENELITIAN	PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	1. Jannah,Miftahul (2024) 2. Firmansyah,Fikrian et.al (2023) 3. Devitasari, Lucy (2022)	Berpengaruh
		1. Lorita, Bete et.al (2021) 2. Gulo, Meria Meriana (2020) 3. Kanji,Lusiana (2019)	Tidak Berpengaruh
2	Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	1. Jannah, Miftahul (2024) 2. Devitasari, Lucy (2022) 3. Azhara,Vanesa (2023)	Berpengaruh
		1. Gulo, Meria Meriana (2022) 2. Yuliana, Novi Antari et.al (2023) 3. Kanji,Lusiana (2019)	Tidak Berpengaruh

Sumber: data dibuat oleh penulis (2025)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, terdapat perbedaan temuan di antara para peneliti. Untuk itu, penulis mencoba mengisi celah penelitian tersebut dengan menggunakan Komite Audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Variabel moderasi ini bertujuan untuk menguji apakah Komite

Audit dapat memoderasi hubungan antara Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Selain itu, Komite Audit berperan sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan manajemen dalam mengatasi masalah pengendalian perusahaan. Tugas Komite Audit juga menyelidiki dan menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menyelidiki sistem pelaporan eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "**PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba?
4. Apakah komite audit mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
- b. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
- c. Untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang dimoderasi oleh komite audit.

- d. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba yang dimoderasi oleh komite audit.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis untuk membantu memperkuat penguasaan materi yang diperoleh selama perkuliahan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi pajak, yang mencakup topik-topik seperti Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak, serta dampaknya terhadap Manajemen Laba. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam literatur bagi peneliti masa depan yang memiliki judul dan variabel penelitian serupa.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran mengenai praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh variabel Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, serta Perencanaan Pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman. Sumbangan ini diharapkan dapat membantu pemerintah mencari solusi yang lebih efektif dalam meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba yang didasarkan pada temuan empiris hasil penelitian.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajer agar lebih bertanggung jawab, cermat, dan bijak dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan manajer tidak melakukan penyimpangan terhadap informasi keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan.

3) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan pengetahuan bagi investor agar dapat lebih cermat dalam menginvestasikan modalnya. Investor dapat memanfaatkan informasi keuangan yang didapatkan dari perusahaan (termasuk variabel Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak) untuk meminimalisir adanya risiko dalam investasi yang dilakukan.

